

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Secara global, infrastruktur yang andal tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi dan distribusi, tetapi juga sebagai fondasi dalam meningkatkan daya saing, mendorong investasi, serta memperkuat integrasi ekonomi antar wilayah. Negara-negara maju menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sementara negara berkembang berupaya mengejar ketertinggalan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting karena berhubungan langsung dengan mobilitas, konektivitas, dan produktivitas masyarakat.

Membangun infrastruktur juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan pembangunan yang adil bagi semua orang, dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank Dunia (1994) menyatakan bahwa infrastruktur tidak hanya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat; tetapi juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹ Infrastruktur yang memadai, baik berupa transportasi, energi, air bersih, maupun telekomunikasi, dapat menciptakan konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing suatu wilayah. Pentingnya pembangunan

¹ World Bank. (1994). World Development Report 1994: Infrastructure for Development. Washington DC: Oxford University Press.

infrastruktur ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.²

Infrastruktur yang kuat dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari segi keuangan, infrastruktur yang baik dapat menurunkan biaya pengiriman barang, membantu bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan, dan menarik lebih banyak investasi. Secara sosial, cara pembangunan infrastruktur membantu lebih banyak orang mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik penting lainnya. Dari sudut pandang pembangunan regional, pembangunan infrastruktur dapat membantu daerah-daerah yang kurang berkembang untuk tumbuh lebih cepat, mengurangi kesenjangan, dan mempererat hubungan antar wilayah. Selain itu, infrastruktur membantu menghubungkan berbagai tempat dan juga memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan. Misalnya, sistem transportasi yang terintegrasi dapat mempercepat pergerakan barang antar wilayah, yang dapat menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk menjual produk mereka dan membantu perusahaan lokal dan nasional untuk berkembang. Selanjutnya, ketika infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan energi dibangun secara merata ke kawasan tertinggal, maka disparitas ekonomi antar daerah dapat ditekan, karena akses investasi dan layanan publik tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota saja. Secara sosial, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil

² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33.

membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses yang baik terhadap layanan tersebut, yang membantu membangun populasi yang lebih kuat dan terampil di daerah tersebut. Infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat bergerak, mengantarkan barang dan jasa ke tempat yang mereka butuhkan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan perekonomiannya. Silvia Sukirman mengatakan bahwa jalan adalah jalur yang dibuat di permukaan bumi oleh manusia, dan jalan tersebut memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan cara pembuatan. Jalur-jalur ini membantu manusia, hewan, dan kendaraan bergerak dengan cepat dan mudah dari satu tempat ke tempat lain.³ Sebagai salah satu bentuk realisasi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor krusial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menggariskan bahwa negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Aktivitas sehari-hari masyarakat sangat terbantu oleh infrastruktur. Dewasa ini, setiap negara menawarkan manfaat bagi rakyatnya. Sebagai komponen pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur merupakan layanan yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan bagian dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Jadi, membangun dan memelihara jalan dalam kondisi baik bukan hanya tentang

³ Silvia Sukirman, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, NOVA, Bandung, 1999.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

pekerjaan teknik dan rekayasa. Hal ini juga memainkan peran penting dalam membantu mencapai pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Jalan yang baik akan membantu memindahkan barang dengan lebih mudah, menurunkan biaya perjalanan, dan menghemat waktu bagi masyarakat maupun perusahaan. Jaringan jalan yang tersebar di daerah terpencil dapat membantu masyarakat mengakses peluang ekonomi baru, meningkatkan koneksi antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Dalam konteks sosial, jalan yang baik membantu masyarakat mengakses layanan penting seperti sekolah, rumah sakit, dan layanan pemerintah dengan lebih mudah, yang pada gilirannya membuat hidup lebih baik dan meningkatkan kebahagiaan serta kesehatan kelompok secara keseluruhan.

Sebagai urusan publik yang strategis, infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan infrastruktur jalan harus dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik, mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama karena berperan langsung dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Kualitas dan ketersediaan jaringan jalan yang memadai akan menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa, mobilitas tenaga kerja, serta efektivitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak atau tidak terpelihara dengan baik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

risiko kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. pengelolaan infrastruktur jalan sebagai urusan publik strategis menuntut adanya tata kelola yang baik (*good governance*), mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pemerintah dituntut untuk mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur jalan menjadi faktor penting agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (yang telah diubah sebagian melalui UU No. 2 Tahun 2022)⁵, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan⁶, dijabarkan fungsi-fungsi jalan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Jalan menjelaskan bahwa jalan, sebagai infrastruktur transportasi, sangat penting untuk membantu perekonomian, masyarakat, budaya, dan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan bukan hanya tentang membangun jalur, tetapi juga merupakan bagian penting dari jaringan transportasi negara. Jalan membantu mewujudkan pembangunan yang adil bagi semua orang, menyatukan masyarakat sebagai satu bangsa, dan membuat negara lebih sukses di dunia.

⁵ Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan

⁶ Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

2. Terdapat dua sistem jaringan jalan yang berbeda yang tercakup dalam fungsi jalan ini: primer dan sekunder. Jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer semuanya merupakan bagian dari jaringan jalan primer. Jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder semuanya merupakan bagian dari jaringan sekunder.
3. Fungsi jalan menjadi salah satu dasar untuk menetapkan status jalan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa) dan kelas jalan. Misalnya, jalan nasional mencakup jalan arteri dan kolektor dalam jaringan primer antara ibu kota provinsi atau lintas antar provinsi

Klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan di Indonesia dibedakan menurut tingkat kewenangan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan tersebut. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan jalan agar dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. adapun klasifikasi jalan berdasarkan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Jalan nasional adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jalan-jalan ini menghubungkan ibu kota provinsi, lokasi-lokasi penting nasional, dan tempat-tempat utama pengiriman dan penerimaan barang, seperti pelabuhan dan bandara. Jalan tol juga dianggap sebagai bagian dari jaringan jalan nasional karena penting bagi sistem transportasi negara dan membantu menghubungkan berbagai wilayah di area yang luas.

2. Jalan provinsi adalah jalan yang dipelihara dan dikendalikan oleh pemerintah provinsi. Jalan-jalan ini menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota distrik atau kota, dan juga menghubungkan ibu kota distrik atau kota dalam provinsi yang sama. Jalan provinsi juga sangat penting untuk membantu perekonomian dan kelancaran kerja pemerintah di tingkat provinsi.
3. Jalan distrik atau kota adalah jalan yang dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah daerah distrik atau kota tersebut. Jalan-jalan ini menghubungkan ibu kota distrik atau kota dengan ibu kota kecamatan, menghubungkan kecamatan-kecamatan, dan membantu masyarakat untuk bergerak di dalam distrik atau kota tersebut. Jalan distrik dan kota biasanya digunakan untuk kegiatan lokal seperti jual beli barang, pergi ke sekolah, dan mengakses layanan yang dibutuhkan masyarakat setiap hari.
4. Jalan desa atau nagari adalah jalan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Jalan ini melayani kebutuhan transportasi masyarakat desa, seperti menghubungkan antarpermukiman, menghubungkan desa dengan lahan pertanian, perkebunan, serta fasilitas umum desa. Meskipun berskala lokal, jalan desa memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.⁷

Dalam pembangunan jalan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) adalah lembaga teknis pemerintah yang terutama bertanggung jawab

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

untuk menyediakan infrastruktur publik, khususnya jaringan jalan. Departemen ini penting di seluruh proses, mulai dari perencanaan, pembangunan, menjaga kondisi jalan tetap baik, dan memeriksa kualitas jalan untuk memastikan semuanya memenuhi standar yang dibutuhkan. Departemen PUPR menunjukkan bagaimana pemerintah membantu menyediakan layanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat. Pembangunan jalan dilihat lebih dari sekadar aspek fisik. Pembangunan jalan juga membantu pertumbuhan ekonomi, memudahkan pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Oleh karena itu, Departemen PUPR bertindak sebagai kekuatan utama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk membangun jaringan jalan yang baik, adil, dan tahan lama. Departemen PUPR juga memainkan peran penting dalam menentukan proyek pembangunan mana yang harus difokuskan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan situasi spesifik wilayah tersebut. Hal ini mencakup melihat seberapa padat lalu lintas, seberapa buruk kondisi jalan, dan seberapa cepat akses ke daerah-daerah di mana ekonomi berkembang dan ke tempat-tempat yang jauh perlu ditingkatkan. Dengan peran tersebut, Dinas PUPR tidak hanya bekerja pada ranah teknis, tetapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peran ganda sebagai pelaksana teknis dan penyusun kebijakan inilah yang menjadikan Dinas PUPR sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur jalan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kata strategi juga disebut sebagai metode untuk memenangkan pertempuran atau perang dalam situasi militer di seluruh dunia. Banyak ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang apa arti strategi, tetapi pada intinya, strategi adalah tentang

mencapai tujuan dengan cara yang cerdas dan efektif. Menurut Argyris di Hutapea, strategi adalah cara yang berkelanjutan dan fleksibel untuk menghadapi peluang dan bahaya eksternal, serta keuntungan dan kerugian internal, yang semuanya memengaruhi bagaimana suatu organisasi tumbuh dan berubah.⁸ Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol.⁹

Dalam organisasi, memiliki strategi sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau untuk melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Jenis rencana yang digunakan perusahaan bisa berbeda-beda. Beberapa metode digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lynch dalam bukunya *Performance Management* mengatakan bahwa strategi perusahaan, yang juga disebut strategi korporat, adalah rencana yang menyatukan tujuan dan kebijakan utama perusahaan dengan serangkaian tindakan, yang semuanya terhubung sedemikian rupa sehingga saling bergantung. Strategi korporat biasanya bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan utamanya dan menunjukkan langkah-langkah tepat yang akan diambil perusahaan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰

⁸ Hutapea. 2017. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Jurnal Organisasi Manajemen. Volume 4 No.1

⁹ Wheelen, T dan Hunger, D. 2012. Strategic Management and Business Policy.13th. Prentice Hall.

¹⁰ Dermawan Wibisono, Ph.D, (Manajemen Kinerja, Jakarta,Penerbit erlangga2010), hlm 50

Pendekatan yang digunakan pemerintah menunjukkan upaya mereka dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan masa depan dengan melihat apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menangani berbagai hal secara berbeda dibandingkan dengan sektor swasta. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristik yang berbeda. Pemerintah juga merupakan pemain kunci dalam negara yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya, yang meliputi melakukan hal yang benar dan tepat untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengambil tindakan dan menerapkan berbagai keputusan. Alasan utama pembentukan daerah adalah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan membantu mencapai kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat, serta untuk membantu mendidik masyarakat tentang politik di tingkat lokal. Pemerintahan dikenal diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city*, dengan lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Dalam mengatur cara kerja pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan strategi karena hal itu memengaruhi seberapa baik pemerintah dapat menangani berbagai masalah publik, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya. Infrastruktur jalan dianggap sebagai layanan publik yang berdampak langsung pada seluruh masyarakat, sehingga perbaikannya tidak dapat dilakukan berdasarkan risiko semata. Sebaliknya, diperlukan perencanaan yang cermat dan jangka panjang. Sebuah rencana diperlukan untuk menentukan tujuan utama, area fokus, dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengembangan infrastruktur dengan sukses.

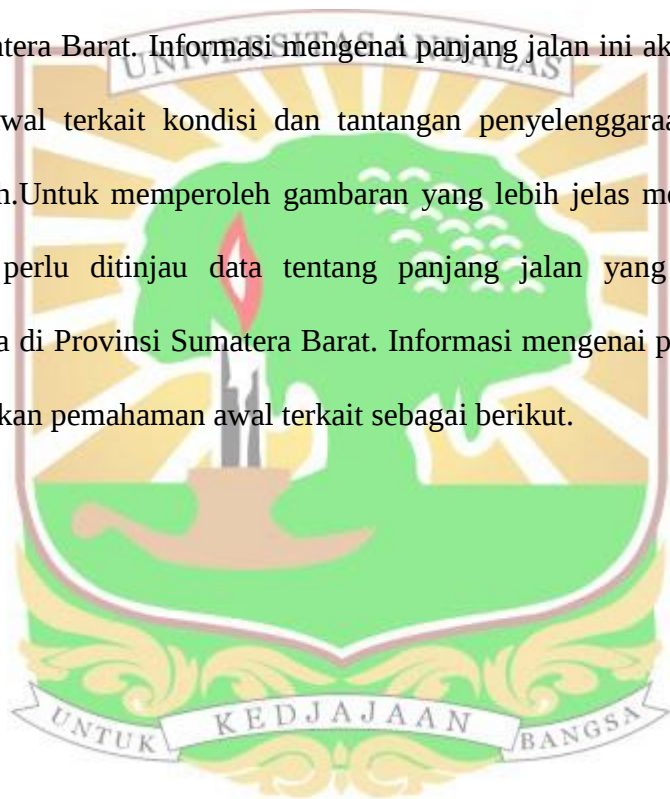
Mengelola perbaikan jalan membutuhkan penanganan berbagai kesulitan, seperti kekurangan dana, sedikitnya persediaan, kondisi cuaca dan lahan yang berbeda, serta berbagai kebutuhan dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dalam kasus ini, strategi membantu pemerintah daerah menggunakan sumber daya mereka dengan lebih baik, menyesuaikan pekerjaan mereka dengan kebutuhan masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan yang mereka buat memiliki alasan yang jelas untuk dipertimbangkan. Jika tidak ada rencana yang baik, perbaikan mungkin tidak berjalan dengan baik dan mungkin tidak membantu masyarakat sebanyak yang seharusnya. Mempelajari cara mengelola infrastruktur jalan sangat penting karena menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dalam menyediakan layanan publik. Strategi yang dibuat dan diterapkan oleh Badan Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang (PUPR) menunjukkan lebih dari sekadar keterampilan teknis. Strategi tersebut juga menunjukkan manajemen yang baik, kerja sama yang baik dengan lembaga lain, dan pengambilan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mempelajari cara menangani proyek perbaikan jalan sangat penting untuk mempelajari bagaimana pemerintah daerah menangani masalah masyarakat dan bekerja menuju tujuan regional yang lebih besar.

Dalam melakukan proses perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah daerah menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta pengaruh kondisi geografis dan tingginya beban lalu lintas. Permasalahan tersebut menuntut adanya strategi yang tepat agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara terencana dan tepat sasaran. Strategi menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan, mengoptimalkan sumber

daya yang tersedia, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan.

Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian adalah Kabupaten Dharmasraya, sebagai wilayah yang terletak di bagian selatan Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi serta Riau. Posisi strategis Dharmasraya sebagai pintu gerbang Sumatera Barat ke wilayah luar provinsi menjadikan pembangunan jalan di daerah ini sangat penting untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Kabupaten Dharmasraya memiliki jaringan jalan dengan total panjang mencapai 1.266 km, yang terdiri dari jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tersebar hingga ke seluruh kecamatan dan nagari. Keterkaitan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terlihat dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang melintasi wilayah tersebut. Jalan-jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar kabupaten/kota, tetapi juga membuka akses ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi basis perekonomian Dharmasraya. Dengan dukungan infrastruktur jalan yang memadai, distribusi hasil produksi ke pasar regional maupun antarprovinsi dapat berlangsung lebih efisien, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sinergi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menjadi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan, baik pada ruas jalan provinsi maupun dalam upaya peningkatan kualitas jalan kabupaten yang merupakan bagian terbesar dari total panjang jalan tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan,

mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya. Dengan demikian, pembangunan jalan di Kabupaten Dharmasraya bukan hanya bagian dari agenda pembangunan provinsi, tetapi juga merupakan strategi pembangunan daerah yang lebih luas dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah Sumatera Barat secara keseluruhan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi infrastruktur jalan, perlu ditinjau data mengenai panjang jalan yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Informasi mengenai panjang jalan ini akan memberikan pemahaman awal terkait kondisi dan tantangan penyelenggaraan infrastruktur jalan di daerah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi infrastruktur, perlu ditinjau data tentang panjang jalan yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Informasi mengenai panjang jalan ini akan memberikan pemahaman awal terkait sebagai berikut.



Tabel 1. 1
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan
Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat (km), 2024

No	Kabupaten / Kota	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat (Km), 2024			
		Jalan Negara (Km)	Jalan Provinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jumlah Panjang Jalan (Km)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	78	11	1.130	1.219
2	Kab. Pesisir Selatan	249	103	2.333	2.685
3	Kab. Solok	132	191	1.153	1.476
4	Kab. Sijunjung	108	87	829	1.025
5	Kab. Tanah Datar	25	139	1.503	1.667
6	Kab. Padang Pariaman	102	97	2.072	2.271
7	Kab. Agam	100	154	1.695	1.949
8	Kab. Lima Puluh Kota	91	183	1.101	1.375
9	Kab. Pasaman	94	183	866	1.142
10	Solok Selatan	98	94	1.178	1.370
11	Dharmasraya	58	155	839	1.052
12	Pasaman Barat	134	202	825	1.161
13	Kota Padang	85	38	625	747
14	Kota Solok	9	1	216	226
15	Kota Sawah Lunto	12	33	455	500
16	Kota Padang Panjang	12	–	94	106
17	Kota Bukittinggi	11	–	198	209
18	Kota Payakumbuh	14	18	295	328
19	Kota Pariaman	13	2	438	453
20	Sumatera Barat	1.423	1.691	18.061	21.175

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, terlihat jelas bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki jaringan jalan masing-masing, dan tingkat pengawasan pemerintah terhadap jalan-jalan tersebut bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Data ini memberikan gambaran luas tentang bagaimana jalan-jalan tersebar dan dikelola di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. Sistem jalan yang besar ini menyulitkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) di Kabupaten Dharmasraya, untuk menjaga kondisi jalan agar selalu berfungsi dengan baik. Perbaikan jalan bukan hanya tentang pekerjaan teknis. Hal ini juga melibatkan pembuatan kebijakan yang cerdas, perencanaan proyek, pengelolaan keuangan, dan kerja sama dengan berbagai kelompok untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya tidak dapat berhenti pada aspek panjang jaringan jalan semata. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kondisi jalan yang ada, karena kondisi tersebut mencerminkan tingkat kemantapan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Data kondisi jalan menjadi penting untuk mengidentifikasi ruas jalan yang masih layak maupun yang memerlukan perbaikan, Hal ini juga membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya dalam membuat rencana perbaikan, menentukan program mana yang akan difokuskan, dan mengalokasikan dana secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Jadi, menampilkan informasi tentang kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan saat membangun dan memperbaiki

jalan di daerah tersebut. berikut mengenai data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya (km), 2022-2024:

Tabel 1. 2
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya (km),
2022–2024

Kondisi Jalan	2022	2023	2024
Baik	488,012	455,856	422,900
Sedang	123,483	152,061	151,700
Rusak	303,263	43,973	20,500
Rusak Berat	137,902	400,770	457,500
Jumlah/Total	1.052,660	1.052,660	1.052,660

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, yang mencantumkan panjang jalan berdasarkan kondisinya di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2022 hingga 2024, jelas bahwa infrastruktur jalan di daerah ini mengalami perubahan dan perlu dikelola dengan cermat. Data menunjukkan bagaimana kondisi jalan telah berubah selama tiga tahun terakhir, dengan jalan diklasifikasikan sebagai baik, sedang, rusak, atau sangat rusak. Secara keseluruhan, total panjang jalan yang dalam kondisi baik biasanya semakin berkurang setiap tahunnya. Pada saat yang sama, masih banyak ruas jalan yang rusak atau sangat rusak, dan sebagian besar masih ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah diperbaiki dan dijaga kondisinya tetap baik, tetap sangat sulit untuk menjaga kestabilannya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti ketersediaan dana, kepadatan lalu lintas, lokasi dan lingkungan, serta seberapa baik rencana dan tindakan perbaikan jalan dilakukan. Data tentang kondisi jalan dari tahun 2022 hingga 2024, disusun berdasarkan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi rusak berat di
Kabupaten Dharmasraya (km), 2022-2024

Kecamatan	Kondisi Jalan dengan kondisi rusak berat		
	2022	2023	2024
Sungai Rumbai	11,575	11,575	29,69
Koto Besar	28,259	28,259	82,9
Asam Jujuhan	19,379	35,66	69,7
Koto Baru	11,445	11,445	41,4
Koto Salak	5,044	5,044	18,9
Tiumang	8,229	8,229	39,3
Padang Laweh	2,05	2,05	19,6
Sitiung	4,165	4,165	20,6
Timpeh	14,111	14,111	66,3
Pulau Punjung	6,739	6,739	28,7
IX Koto	10,625	10,625	40,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Dharmasraya 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi jalan rusak berat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tingkat yang berbeda-beda. Kecamatan Koto Salak merupakan salah satu kecamatan yang memiliki panjang jalan dengan kondisi rusak berat yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya, meskipun bukan merupakan kecamatan dengan angka kerusakan jalan tertinggi. Sementara itu, Kecamatan Sungai Rumbai memiliki panjang jalan rusak berat yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Koto Salak. Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Kecamatan Koto Salak dipilih karena memiliki tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi dan pada saat penelitian dilakukan terdapat proyek perbaikan jalan yang sedang

berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses implementasi strategi perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Sementara itu, kondisi Kecamatan Sungai Rumbai yang memiliki tingkat kerusakan jalan relatif lebih rendah dapat digunakan sebagai gambaran pembanding terhadap kondisi jalan di Kecamatan Koto Salak. Dengan demikian, pemilihan Kecamatan Koto Salak didasarkan tidak hanya pada data kondisi jalan yang relatif tinggi, tetapi juga karena adanya kegiatan perbaikan jalan yang sedang berlangsung sehingga dapat memberikan informasi empiris yang lebih relevan mengenai pelaksanaan strategi perbaikan infrastruktur jalan di lapangan.

Gambar 1. 1
Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Olahan Peneliti (2026)

Data kondisi jalan ini menjadi penting karena mencerminkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur dan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya dalam menentukan prioritas perbaikan, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antar pihak terkait,

agar upaya perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan jalan di Kabupaten Dharmasraya masih memiliki banyak masalah dan kesulitan. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya dana untuk memperbaiki dan menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Kebutuhan akan pengeluaran besar tidak selalu sebanding dengan kemampuan daerah untuk membayar, sehingga pemerintah daerah harus memutuskan jalan mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Dalam sebuah berita berjudul Utama Post, disebutkan bahwa Jalan Kabupaten Dharmasraya mengalami kerusakan signifikan di beberapa area. Meskipun anggaran terbatas karena masalah efisiensi dan defisit sebesar Rp 96 miliar, Bupati Annisa Suci Ramadhani berencana untuk mengeluarkan sekitar Rp 6,6 miliar untuk perbaikan. Biaya perbaikan tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD-P) 2025. Untuk memastikan pekerjaan dilakukan di tempat yang tepat, Bupati Annisa langsung turun ke lapangan di Kecamatan Tiunan dan Sitiung. Beberapa ruas jalan termasuk dalam APBD Revisi 2025. Jalan-jalan tersebut adalah Jalan Simpang Blok E-Sipangkur, Jalan Pulai-Simpang Tabek, dan Jalan Simpang Lawai Sitiung Lama. Bupati Annisa mengatakan bahwa pemerintah daerah masih bekerja keras untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal membangun dan meningkatkan infrastruktur, meskipun mereka menghadapi tantangan keuangan dan harus mengikuti aturan ketat tentang penggunaan anggaran negara secara bijak.

“Pemerintah daerah berusaha bekerja sekuat tenaga mungkin untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena di era keterbatasan

anggaran. Infrastruktur jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi yang harus kita jaga agar aktivitas masyarakat tetap lancar,” ujar Bupati Annisa.¹¹

Akibatnya, tidak semua ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat ditangani secara bersamaan. Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan jalan adalah luasnya wilayah dan panjang jaringan jalan yang harus dikelola, serta tingginya intensitas penggunaan jalan untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi geografis dan faktor cuaca juga turut mempengaruhi tingkat kerusakan jalan, yang pada akhirnya menambah beban pemeliharaan. Dalam situasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk mampu menyusun strategi pengelolaan jalan yang efektif, baik dalam perencanaan program, pemanfaatan anggaran, maupun koordinasi dengan pihak terkait, agar pelayanan infrastruktur jalan tetap dapat berjalan secara optimal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan jalan.¹² Sebagai instansi teknis daerah, Dinas PUPR tidak hanya terlibat terhadap pengelolaan jalan kabupaten, tetapi juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas jaringan jalan provinsi yang melintasi wilayah Dharmasraya. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat sebagian ruas jalan masih ada beberapa dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat, yang jika tidak segera ditangani dapat menghambat

¹¹ Utama post (2025). Jalan Kabupaten Rusak Parah, Bupati Anggarkan Rp6,6 Miliar Tahun Ini. diakses dari <https://utamapost.co.id/jalan-kabupaten-rusak-parah-bupati-anggarkan-rp66-miliar-tahun-ini/>

¹² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020–2024. Jakarta: Kementerian PUPR, 2020.

konektivitas serta mengurangi efektivitas pemanfaatan infrastruktur. Dengan demikian, keberadaan Dinas PUPR Dharmasraya dapat dipandang sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur transportasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan, serta memperkuat posisi Dharmasraya sebagai pintu gerbang Sumatera Barat ke provinsi lain.

Dalam pelaksanaan strategi perbaikan jalan di Kabupaten Dharmasraya, Dinas PUPR tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Hal ini dikarenakan infrastruktur jalan tidak hanya melihat dengan aspek fisik pembangunan, tetapi juga berkaitan erat dengan kelancaran transportasi, keselamatan lalu lintas, dan mobilitas masyarakat. Dinas Perhubungan memiliki tugas dalam pengaturan lalu lintas, pengawasan keselamatan transportasi, pemasangan rambu-rambu, marka jalan, serta manajemen rekayasa lalu lintas.¹³

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, infrastruktur jalan termasuk salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keberadaan jalan yang layak dan berfungsi dengan baik menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Jalan berperan sebagai sarana penghubung antarwilayah yang memungkinkan distribusi barang dan jasa berjalan lebih efisien, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, infrastruktur jalan juga

¹³ Undang Undang NO 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang utama yang mengatur seluruh sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

memiliki kesamaan yang erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Jalan yang mantap akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dalam hal ini, seberapa baik infrastruktur jalan dikembangkan menunjukkan seberapa sukses pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam menyediakan pelayanan publik. Jadi, pengelolaan infrastruktur jalan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan otonomi daerah. Otonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan menetapkan tujuan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah mereka. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) di Kabupaten Dharmasraya untuk mengelola dan meningkatkan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mencapai pertumbuhan daerah yang berkelanjutan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan daerah yang seimbang dan berkelanjutan. Misi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berdedikasi untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur tersebar merata dan tidak hanya di beberapa daerah saja. Hal ini memastikan bahwa semua daerah mendapatkan apa yang mereka butuhkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan spesifik mereka. Untuk membantu mencapai misi ini, telah ditetapkan tujuan-tujuan khusus untuk pembangunan daerah. Tujuan-tujuan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan

kuantitas infrastruktur yang solid, serta pelaksanaan perencanaan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 1.4
Renstra PUPR (Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infratraktur yang mantap dan penyelengaraa penataan ruang yang aman,nyaman produktif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasrana jalan,jembatan dan infrastruktur kebinamargaan lainnya	1. Penyelenggaraan Jalan kabupaten 2. Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Tujuan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya memperbanyak pembangunan infrastruktur secara fisik, tetapi juga memastikan mutu dan keberlanjutannya agar mampu menunjang pembangunan jangka panjang. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan serta jembatan di Kabupaten Dharmasraya. Jalan dan jembatan yang berkualitas dan memadai diharapkan dapat memperlancar aksesibilitas antarwilayah, memperkuat konektivitas, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik secara lebih optimal. Untuk

mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan strategi berupa upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan juga infrastruktur kebinamargaan lainnya. Strategi ini menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan, yang diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi wilayah yang beragam.

Namun demikian, capaian tujuan dan sasaran tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan yang mantap sebagaimana direncanakan belum sepenuhnya terwujud secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan data kondisi jalan kabupaten, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang berada dalam kondisi rusak, termasuk kategori rusak berat, yang tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi infrastruktur jalan sangat bergantung pada situasi di dalam organisasi, terutama seberapa banyak dan seberapa mumpuni orang-orang yang melaksanakan kebijakan tersebut. Cara organisasi disusun memainkan peran besar dalam seberapa baik rencana-rencananya dapat dilaksanakan dengan sukses. Menurut data kepegawaian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya saat ini memiliki 141 orang, termasuk 43 pegawai negeri sipil, 4 staf P3K, dan 94 pekerja P3K. Komposisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan dan tanggung jawab di kantor tersebut sebagian besar masih dilakukan oleh pekerja sementara. Kondisi ini

menunjukkan masalah di tempat kerja, terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan dapat diandalkan. Penggunaan banyak pekerja sementara dapat berdampak pada seberapa baik tugas-tugas dilakukan, terutama pada proyek-proyek yang membutuhkan keahlian khusus, pekerjaan yang stabil, dan menjaga konsistensi dalam perbaikan jalan.

Selain faktor lingkungan, tindakan juga menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan strategi. salah satunya melalui pelaksanaan survei kondisi jalan. Survei ini menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas perbaikan infrastruktur jalan. Namun, di Kabupaten Dharmasraya, memiliki jaringan jalan dan jembatan yang belum memadai serta rendahnya kondisi jalan yang baik/mantap menunjukkan bahwa tindakan strategis tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan wilayah.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan tindakan strategis tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran organisasi. Tindakan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan evaluasi yang sistematis agar kelemahan dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Namun, dalam praktik pengelolaan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya, proses evaluasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa hasil pelaksanaan survei dan program perbaikan jalan belum secara konsisten ditindaklanjuti sebagai dasar penyesuaian strategi dan penetapan prioritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran organisasi masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari strategi dalam perbaikan infrastruktur jalan, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kualitas, serta pemeliharaan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, Dinas PUPR mengoptimalkan sistem pendataan dan pemetaan kondisi jalan secara digital untuk menentukan prioritas perbaikan maupun pembangunan baru sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan, strategi yang ditempuh adalah memastikan penggunaan material konstruksi yang sesuai standar serta penggunaan teknologi tepat guna yang mampu menaikkan daya tahan jalan terhadap beban lalu lintas maupun faktor cuaca. Sementara itu, pada aspek pemeliharaan, Dinas PUPR mengedepankan pendekatan preventif melalui program perawatan rutin dan inspeksi berkala agar kerusakan jalan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga tidak menimbulkan biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari. Dengan strategi tersebut, Dinas PUPR Dharmasraya berupaya menciptakan jaringan jalan yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga efisien, berkelanjutan, dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung fokus pada kondisi fisik jalan, tingkat kestabilan jalan, serta efektivitas program pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan. Penelitian tersebut biasanya menempatkan infrastruktur jalan sebagai benda teknis, sehingga analisis utamanya lebih menyoroti hasil akhir dari pembangunan atau kondisi jalan setelah selesai. Namun, penelitian yang membahas bagaimana Strategi pemerintah daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengelola dan memperbaiki jalan di tingkat

kabupaten masih terbatas. Padahal, cara kerja atau Strategi organisasi pemerintah sangat penting dalam menentukan kesuksesan pengelolaan jalan, terutama dalam menghadapi kendala seperti anggaran yang terbatas, tenaga kependidikan yang kurang, serta kebutuhan masyarakat yang beragam.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa fokus utama kajian tidak terletak pada hasil fisik pembangunan jalan, seperti panjang jalan yang dibangun atau tingkat kemantapan jalan, melainkan pada strategi pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Strategi dipandang sebagai elemen kunci yang menentukan arah kebijakan, pengambilan keputusan, serta efektivitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya menyusun perencanaan strategis, menetapkan prioritas perbaikan, mengelola sumber daya, serta melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji apa yang telah dihasilkan, tetapi lebih menekankan pada proses dan pendekatan strategis yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan studi di bidang administrasi publik, khususnya di bidang seperti pengelolaan infrastruktur dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Studi ini dapat membantu memahami lebih baik bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan jalan, yang ditetapkan oleh peraturan nasional dan daerah, benar-benar diterapkan di tingkat kabupaten oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan latar belakang dan peristiwa yang telah dibahas sebelumnya, sangat penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) di Kabupaten Dharmasraya untuk memiliki rencana yang membantu pengelolaan infrastruktur jalan. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul tersebut “Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Dharmasraya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. “Bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya”?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan peneliti ini adalah Untuk menganalisis strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada bidang administrasi pembangunan dan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur. Selama ini, kajian administrasi publik lebih banyak berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, sementara sektor pengelolaan infrastruktur jalan masih relatif jarang dijadikan penelitian. Kehadiran penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan analisis empiris mengenai strategi manajemen yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam

mendukung pengelolaan infrastruktur jalan di daerah. Dengan demikian, penelitian ini mampu memperluas cakupan studi administrasi publik agar lebih inklusif terhadap isu-isu infrastruktur, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian tentang Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Dharmasraya ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam membantu Dinas PUPR menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif ke depan. Diharapkan strategi yang sudah berjalan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara strategi yang kurang efektif dapat diperbaiki atau ditinggalkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan infrastruktur jalan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Dharmasraya.

